

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN – III



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya
Tahun 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
 BAB I KINERJA	 1
A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansial	1
 BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	 18
A. Kendala dan Permasalahan	18
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	18
 BAB III PENUTUP	 20
 LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis PD Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum ada peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan II, yang terutama dalam rencana aksi pelaksanaan kinerja. Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada capaian visi dan misi. Capaian pada triwulan III merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. Masih ada target yang belum tercapai dan akan ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 11 Oktober 2022

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

BAB I
KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Triwulan III serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100,219% 98,542%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	101,96%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak - Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	100% 100%
4.	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	50%
5.	Meningkatkan kualitas keluarga - Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) - Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) - Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	89,53 93,75 105

6.	Meningkatnya akseptor KB		
	- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	91,60	
	- Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	27,47	
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		BB
	JUMLAH	87,0973	

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan III Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100,219 %	Bidang I
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43	3,43	3,38	98,542%	Bidang I
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	110,44%	101,96%	Bidang IV dan UPT-PPA
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,725	61,725	100%	Bidang III
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50	49	49	100%	Bidang III dan UPT-PPA
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	2	1	50%	Bidang II

5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32	60,32	54,01	89,53	Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,10	2,24	93,75	Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/AS FR 15-19	21	21	20	105	Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	67,08	91,60	Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	19,51	27,47	Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	100 %	Sekretaria t

Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					14.945.745.489
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.462.986.189
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah				11.329.594.098
1.		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			270.242.850
	a.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.499.900
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	23.638.100
	c.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	26.208.500

	d.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	204.896.350
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.064.584.912
	a.		Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN		6.993.084.912
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	6.500.000
	c.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	65.000.000
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.500.000
	a.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	13.500.000
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.642.000
	a.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	49.642.000
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.673.032.826

	a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	26.504.000
	b.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	95.640.000
	c		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	62.000.000
	d.		Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	22.825.000
	e.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	396.900.000
	f.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	996.958.826
	g.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	72.205.000
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah			627.969.000
	a.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	400.469.000
	b.		Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	12 Bulan	227.500.000
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.508.236.260
	a.		PenyediaanJasa Surat Menyurat	12 Bulan	10.500.000

	b.		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	278.713.860
	c.		PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.219.022.400
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			122.386.250
	b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		73.166.250
	c.		Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya		49.220.000
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.283.531.350
1.		Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			188.500.000
	a		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	70.000.000
	b		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	70.000.000

	c		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasukPPRG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	48.500.000
2.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			1.069.681.350
	a		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosialdan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	955.000.000
	b		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	114.681.350

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			25.350.000
a.			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	25.350.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				681.024.621
1.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			406.027.000
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan	5 Dokumen	47.921.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	358.106.000
2.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			221.427.577
a.			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	130.907.577
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	90.520.000
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			53.570.044

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	48.570.044
a.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
1.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			157.547.750
a.			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	74.398.750
2.		Penyedia Layanan bagi keluarga Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			83.149.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Provinsi		
a.			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		83.149.250
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				218.245.000
1.		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			218.245.000
a.			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	7 Dokumen	67.320.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	7 Dokumen	150.925.000
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				360.341.370
1.		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			233.795.650
a.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	161.187.650
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	72.608.000
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			126.545.720
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	61.484.000
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				432.702.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			75.450.000
2.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Provinsi			305.946.000
a			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	130.902.000
b			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	1 Dokumen	175.044.000
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				51.306.000
1.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			51.306.000

a.			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	n	150. 000.000
b.			Advokasi dan Sosialisasi GDPK	2 Dokumen	48.477.300
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				136.994.500
1.		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			52.024.500
a.			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	52.024.500
b.			Pembinaan Promosi Pengembang an dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK dan Konseling Kesehatan Reproduksi	2 Dokumen	84.970.000

No.	Program	Kegiatan		Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				147. 287.500
1.		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			147. 287.500

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan III adalah :

- a. Perubahan fungsi untuk urusan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya pelayanan diperlukan penyesuaian baik dari sisi perencanaan penganggaran hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi dan regulasi sebagai pendukung.
- b. Kurangnya tenaga di Dinas P3APKB sehingga pencapaian program dan kegiatan kurang maksimal.
- c. Dengan berdirinya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan anggaran, sarana, prasarana dan tenaga profesional sehingga Pelayanan dapat berjalan maksimal
- d. Perlunya Pemahaman aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana belum menyeluruh
- e. Kontribusi ekonomi dari segi sumbangan pendapatan perempuan masih perlu ditingkatkan
- f. Adanya pergantian Pejabat pada Kelembagaan pendukung PUG (Focal poin, Tim Teknis ARG) sehingga pelaksanaan PUG masih terbatas dalam bentuk sosialisasi.
- g. Kurangnya tenaga terlatih untuk pengkaderan/ memberikan pelatihan PPRG.
- h. Data Terpilah Gender belum digunakan secara optimal.
- i. TFR diharapkan menurun setiap tahunnya, merupakan cerminan dari keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan KB. TFR masih stagnan dan tidak terjadi penurunan diakibatkan pandemi Covid-19 cukup berdampak dalam keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan KB sehingga penurunan angka kelahiran masih stagnan.
- j. Belum tercapainya Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
- k. Masih tingginya angka Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)
- l. Perhitungan IPA dilakukan oleh pusat sehingga setiap tahun harus menunggu hasil tersebut diturunkan ke provinsi
- m. Belum semua kab/kota mendapatkan KLA. Tahun 2022 hanya 4 kab/kota, yaitu predikat Pratama kab. Kobar, Pulpis dan Kapuas.
Predikat Madya kota Palangka Raya.

- n. Masih belum terkumpulnya Data dari SOPD terkait pada masing – masing kabupaten/kota

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Beberapa tindak lanjut yang dapat diterapkan guna meminimalisir rendahnya capaian kinerja berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Dengan adanya UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai fungsi pelayanan maksimal kepada masyarakat korban kekerasan diperlukan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia, Rumah Aman dan kegiatan-kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perlu diimplementasikan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II sampai ditingkat eselon III dan IV, fungsional dan pelaksana.
- c. Pergub 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tugas pokok fungsi PD, dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP guna mendukung pelayanan.
- d. Dilakukan review terhadap kinerja masing-masing bidang pelayanan menyangkut capaian program (*outcome*), kegiatan (*output*) yang dituangkan kedalam satu bentuk dokumen.
- e. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ke dalam periode bulan/triwulan/semesteran dan monitoring pencapaiannya.
- f. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat-diklat dan pelatihan teknis, memperbanyak koordinasi baik vertikal dan sektoral terkait bidang layanan.
- g. Perlu adanya inovasi dan strategi dalam pencapaian target indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- h. Perlu diberikannya Reward kepada Pegawai dan Pejabat yang berhasil dalam pencapaian indikator dan yang berinovasi dalam peningkatan Pencapaian dan kemajuan Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.
- i. Perlu adanya Panisemen kepada pegawai dan pejabat yang belum berhasil dalam pencapaian indikator Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Perlunya meningkatkan kualitas hidup perempuan baik dalam kesehatan, pendidikan dan ekonomi agar meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, politik dan ekonomi.
- k. Perlunya program dan kegiatan guna meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang kewirausahaan.
- l. Agar setiap SOPD dilingkup Provinsi Kalimantan Tengah memasukan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam program kegiatan.
- m. Aplikasi SIPD perlu menyediakan menu Tagging (penandaan) tentang PPRG.
- n. Perlu adanya peraturan Menteri PPPA RI tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender .

- o. Perlunya upaya peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Tengah.
- p. Meningkatkan advokasi dan KIE terkait pentingnya menggunakan kontrasepsi bagi masyarakat.
- q. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- r. Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kepada Akseptor Serta Meningkatkan Kualitas Penyediaan dan Pemanfaatan Alat dan Obat Kontrasepsi Dan Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi Yang Lebih Efektif Serta Efisien Untuk Jangka Panjang.
- s. Menggunakan strategi khusus untuk memahami karakteristik masyarakat setempat dan mengimplementasikan serta memadukan kebijakan lintas sektor untuk mengoptimalkan pencapaian program Bangga Kencana di daerah.
- t. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait maupun organisasi masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan II tahun 2022 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja PD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat

pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target.

2. Perlunya Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Perlunya Penambahan SDM untuk mengisi kekosongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah
4. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja PD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
6. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam implementasinya diperlukan perubahan baik itu individu dan budaya lembaga dari yang belum memahami menjadi memahami, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli terhadap anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam

jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif dan acap kali merupakan output dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja PD ini tidak dapat diukur karena ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 11 Oktober 2022

KEPALA DINAS P3APKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN III

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp. 0536 - 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA 73112

A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Waktu Pelaksanaan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90	Bidang I $IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis})}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	Bidang I Rumus Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD = $\frac{\text{Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dalam GBS di bagi Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD}}{\text{dikalikan 100 \%}}$ = $\frac{3.131.184.116.124}{35.196.877.863}$ = $0,011240 \times 100 \%$ = 1,12 %
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Bidang IV dan UPT-PPA (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Semakin Bagus) Sumber Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA RI
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,515	61,62	61,725	61,83	Bidang III Pelayanan UPT Optimal

	terhadap anak								
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50%	46%	48%	49%	50	Bidang III dan UPT-PPA
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	1	1	2	6	Bidang II Target 6 kab/kota di Triwulan IV setelah Rakor Forum Data se Kalteng, direncanakan pada bulan Juni 2022
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	Target Ibangga Th 2021 55,00 Capaian Ibangga Th 2021 54,01 Sumber Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	Target TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021 2,24 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21	21	21	21	21	Target ASFR Th 2021 24 Capaian ASFR Th 2021 20 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	Target mCPR th 2021 62,16 persen Capaian mCPR th 2021 57,00 persen Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	Target Unmeet need th 2021 8,30 persen Capaian th 2021 18 persen (semakin kecil semakin bagus) Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	BB	BB	Sekretariat

B. Target Realisasi Kinerja Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100,219%	Bidang I IDG = $\frac{(I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis}))}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43	3,43	3,38	98,542%	Bidang I Rumus Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD = $\frac{\text{Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dalam GBS di bagi Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD}}{\text{dikalikan 100 \%}}$ = <u>35.196.877.863</u> $\frac{3.131.184.116.124}{\text{}} = 0,011240 \times 100 \%$ = 1,12 %
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	110,44%	101,96%	Bidang IV dan UPT-PPA (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Semakin Bagus) Sumber Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA RI
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,726	61,726	100%	Bidang III

		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50	49	49	100%	Bidang III dan UPT-PPA Pelayanan UPT Optimal
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota	1	50%	Bidang II Target 6 kab/kota di Triwulan IV setelah Rakor Forum Data se Kalteng, direncanakan pada bulan Juni 2022
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32 (Indeks Pembangunan Keluarga)	60,32	54,01	89,53	Target Ibangga Th 2021 55,00 Capaian Ibangga Th 2021 54,01 Sumber Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,10/Rata-rata anak per wanita	2,10	2,24	93,75	Target TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021 2,24 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21/ kelahiran per 1000 wanita usia 15-29	21	20	105	Target ASFR Th 2021 24 Capaian ASFR Th 2021 20 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	67,08	91,60	Target mCPR th 2021 62,16 persen Capaian mCPR th 2021 57,00 persen Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	19,51	27,47	Target Unmeet need th 2021 8,30 persen Capaian th 2021 18 persen (semakin kecil semakin bagus) Data PK 21

								Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	100 %	Sekretariat

C. Target Realisasi Keuangan Triwulan III

Laporan Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022																				
Per Program Kegiatan/Sub kegiatan keadaan s/d TW III 2022																				
Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH																				
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi s/d 31 Juli 2022					Realisasi s/d 31 Agustus 2022					Realisasi s/d 30 September 2022				
			Output/Outcomes	Volume	Satuan	Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ Outcome s	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17	19	
I	Belanja Tidak Langsung BTL :																			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.993.084.912	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	3.512.223.902	50.22	50.22	8	bulan	4.011.458.757	57.36	57.36	9	Bulan	#####	68.29	68.29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
II	Belanja Langsung :	7.595.528.365																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.009.376.974	Presentase Keterlaksanaa	100	%	33.33	%	1.155.693.785	28.82	28.82	66.67	%	1.365.559.149	34.06	34.06	75.00	%	#####	40.59	40.59
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.237.850	Terlaksananya Perenca	100	%	33.33	%	126.807.850	55.08	55.08	66.67	%	150.856.650	65.52	65.52	75.00	%	150.856.650	65.52	65.52
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.245.900	Tersusunnya Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	7.954.000	25.46	25.46	1	dokumen	7.954.000	25.46	25.46	1	dokumen	7.954.000	25.46	25.46
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.638.100	Tersusunnya Dokumen	1	dokumen	0	dokumen	8.136.000	34.42	34.42	0	dokumen	8.836.000	37.38	37.38	0	dokumen	8.836.000	37.38	37.38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa	26.208.500	Tersusunnya Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	10.420.500	39.76	39.76	1	dokumen	13.655.500	52.10	52.10	1	dokumen	13.655.500	52.10	52.10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.145.350	Tersusunnya Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.297.350	67.25	67.25	1	dokumen	120.411.150	80.73	80.73	1	dokumen	120.411.150	80.73	80.73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.500.000	Terlaksananya Adminis	100	%	33.33	%	24.011.400	33.58	33.58	66.67	%	32.586.400	45.58	45.58	75.00	%	32.586.400	45.58	45.58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	Tersusunnya Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	6.500.000	100.00	100.00	1	dokumen	6.500.000	###	100.00	1	dokumen	6.500.000	100.00	100.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	65.000.000	Tersusunnya Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	17.511.400	26.94	26.94	1	dokumen	26.086.400	40.13	40.13	1	dokumen	26.086.400	40.13	40.13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	Terlaksananya Adminis	100	%	33.33	%	0	0.00	0.00	66.67	%	0	0.00	0.00	75.00	%	5.950.000	59.50	59.50
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	0	0.00	0.00	8	bulan	0	0.00	0.00	9	bulan	5.950.000	59.50	59.50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.642.000	Terlaksananya Adminis	100	%	33.33	%	1.225.000	2.47	2.47	66.67	%	1.575.000	3.17	3.17	75.00	%	1.575.000	3.17	3.17
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fung	49.642.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	1.225.000	2.47	2.47	8	bulan	1.575.000	3.17	3.17	9	bulan	1.575.000	3.17	3.17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.924.351	Terlaksananya Adminis	100	%	33.33	%	265.648.600	25.11	25.11	66.67	%	375.030.820	35.45	35.45	75.00	%	531.138.106	50.21	50.21
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan K	26.504.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	14.274.000	53.86	53.86	8	bulan	14.274.000	53.86	53.86	9	bulan	19.254.000	72.65	72.65
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	19.949.500	49.87	49.87	8	bulan	24.949.500	62.37	62.37	9	bulan	29.948.000	74.87	74.87
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	16.505.000	47.16	47.16	8	bulan	21.682.500	61.95	61.95	9	bulan	21.682.500	61.95	61.95
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.250.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	11.445.000	29.16	29.16	8	bulan	11.445.000	29.16	29.16	9	bulan	11.445.000	29.16	29.16
	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	23.770.000	79.23	79.23	8	bulan	23.770.000	79.23	79.23	9	bulan	28.557.500	95.19	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.960.351	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	179.705.100	22.89	22.89	8	bulan	278.909.820	35.53	35.53	9	bulan	420.251.106	53.54	53.54
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroni	102.210.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	0	0.00	0.00	8	bulan	0	0.00	0.00	9	bulan	0	0.00	0.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.469.000	Terlaksananya Pengada	100	%	33.33	%	346.793.000	57.85	57.85	66.67	%	346.793.000	57.85	57.85	75.00	%	346.793.000	57.85	57.85
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	450.469.000	Tersedianya Aset SKPD	1	tahun	1	tahun	199.200.000	44.22	44.22	1	tahun	199.200.000	44.22	44.22	1	tahun	199.200.000	44.22	44.22
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ata	149.000.000	Tersedianya Sarana da	1	tahun	1	tahun	147.593.000	99.06	99.06	1	tahun	147.593.000	99.06	99.06	1	tahun	147.593.000	99.06	99.06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.900.763.773	Terlaksananya Jasa Per	100	%	33.33	%	342.301.255	18.01	18.01	66.67	%	396.781.299	20.87	20.87	75.00	%	493.531.560	25.96	25.96
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	2.600.000	52.00	52.00	8	bulan	2.600.000	52.00	52.00	9	bulan	2.600.000	76.00	76.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	679.741.373	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	90.497.255	13.31	13.31	8	bulan	118.505.099	17.43	17.43	9	bulan	135.409.560	19.92	19.92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.216.022.400	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	249.204.000	20.49	20.49	8	bulan	275.676.200	22.67	22.67	9	bulan	354.322.000	29.14	29.14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Da	89.840.000	Terlaksananya Pemelih	100	%	33.33	%	48.906.680	54.44	54.44	66.67	%	61.935.980	68.94	68.94	75.00	%	65.155.980	72.52	72.52
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan l	50.000.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	31.186.680	62.37	62.37	8	bulan	39.515.980	79.03	79.03	9	bulan	42.285.980	84.57	84.57
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.840.000	Jumlah bulan penyedia	12	bulan	7	bulan	17.720.000	44.48	44.48	8	bulan	22.420.000	56.28	56.28	9	bulan	22.870.000	57.40	57.40

2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.283.531.350	Jumlah Focal Point PUG S	25	orang	25	orang	815.927.120	63.57	63.57	25	orang	834.427.120	65.01	65.01	25	orang	859.165.120	66.94	66.94
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerin	188.500.000	Dokumen Pelaksanaan	1	dokumen	1	dokumen	90.429.470	47.97	47.97	1	dokumen	93.989.470	49.86	49.86	1	dokumen	104.189.470	55.27	55.27
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan	70.000.000	Jumlah Dokumen ARG S	15	dokumen	7	dokumen	42.613.570	60.88	60.88	8	dokumen	46.173.570	65.96	65.96	9	dokumen	46.173.570	65.96	65.96
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Prov	70.000.000	Jumlah Money PUG di K	7	kegiatan	3	kegiatan	41.635.800	59.48	59.48	5	kegiatan	41.635.800	59.48	59.48	6	kegiatan	51.835.800	74.05	74.05
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termas	48.500.000	Dokumen Hasil Rakor	1	dokumen	0	dokumen	6.180.100	12.74	12.74	0	dokumen	6.180.100	12.74	12.74	0	dokumen	6.180.100	12.74	12.74
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	1.058.031.350	Dokumen Pelaksanaan Ke	1	dokumen	0	dokumen	725.497.650	68.57	68.57	0	dokumen	740.437.650	69.98	69.98	1	dokumen	754.077.650	71.27	71.27
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik	959.000.000	Dokumen Hasil Kegiat	5	dokumen	5	dokumen	724.956.400	75.60	75.60	5	dokumen	739.896.400	77.15	77.15	5	dokumen	753.536.400	78.58	78.58
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	99.031.350	Dokumen Hasil Promos	2	dokumen	1	dokumen	541.250	0.55	0.55	0	dokumen	541.250	0.55	0.55	0	dokumen	541.250	0.55	0.55
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberday	37.000.000	Dokumen Pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	0	0.00	0.00	0	dokumen	0	0.00	0.00	0	dokumen	898.000	2.43	2.43
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan	37.000.000	Jumlah Perempuan UM	20	orang	20	orang	0	0.00	0.00	0	orang	0	0.00	0.00	20	orang	898.000	2.43	2.43
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	681.024.621	Persentase Peningkatan P	85	%	28.33	%	305.772.905	44.90	44.90	56.67	%	387.565.405	56.91	56.91	63.75	%	197.308.950	28.97	28.97
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pih	386.027.000	Dokumen Pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	209.842.405	54.36	54.36	0	dokumen	262.293.905	67.95	67.95		dokumen	141.378.450	36.62	36.62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program da	47.921.000	Jumlah Kabupaten yang	3	kab/kota	3	kab/kota	47.175.000	98.44	98.44	3	kab/kota	47.175.000	98.44	98.44	3	kab/kota	47.175.000	98.44	98.44
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Pe	338.106.000	Jumlah Kab/Kota yang r	3	kab/kota	1	kab/kota	162.667.405	48.11	48.11	2	kab/kota	215.118.905	63.62	63.62	2	kab/kota	239.414.905	70.81	70.81
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Keker	221.427.577	Dokumen Pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	95.930.500	43.32	43.32	1	dokumen	125.271.500	56.57	56.57	1	dokumen	55.930.500	25.26	25.26
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Ko	130.907.577	Tersedianya barang da	12	bulan	7	bulan	60.092.500	45.90	45.90	8	bulan	68.470.500	52.30	52.30	9	bulan	71.132.500	54.34	54.34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan R	90.520.000	Dokumen pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	35.838.000	39.59	39.59	0	dokumen	56.801.000	62.75	62.75	0	dokumen	68.526.000	75.70	75.70
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindun	73.570.044	Dokumen Pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	0	0.00	0.00	0	dokumen	0	0.00	0.00	0	dokumen	0	0.00	0.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	48.570.044	Jumlah SDM yang terl	30	orang	0	orang	0	0.00	0.00	0	orang	0	0.00	0.00	0	orang	0	0.00	0.00
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi D	25.000.000	Jumlah Kegiatan Pelaks	2	kegiatan	0	kegiatan	0	0.00	0.00	0	kegiatan	0	0.00	0.00	0	kegiatan	0	0.00	0.00
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	157.547.750	Jumah peserta Pelatihan	35	orang	35	orang	142.807.250	90.64	90.64	35	orang	151.913.250	96.42	96.42	35	orang	90.209.250	57.26	57.26
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	74.398.750	Jumlah kab/kota yang r	2	kab/kota	2	kab/kota	71.209.250	95.71	95.71	2	kab/kota	71.209.250	95.71	95.71	2	kab/kota	71.209.250	95.71	95.71
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualita	74.398.750	Jumlah kab/kota yang r	10	kab/kota	10	kab/kota	71.209.250	95.71	95.71	10	kab/kota	71.209.250	95.71	95.71	18	kab/kota	71.209.250	95.71	95.71
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak An	83.149.000	Dokumen hasil pelaksa	1	dokumen	1	dokumen	71.598.000	86.11	86.11	1	dokumen	80.704.000	97.06	97.06	1	dokumen	19.000.000	22.85	22.85
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga d	83.149.000	Dokumen hasil pelaksa	1	dokumen	1	dokumen	71.598.000	86.11	86.11	1	dokumen	80.704.000	97.06	97.06	1	dokumen	19.000.000	22.85	22.85
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	218.245.000	Dokumen hasil program p	11	dokumen	1	dokumen	74.679.000	34.22	34.22	1	dokumen	114.920.300	52.66	52.66	1	dokumen	52.136.000	23.89	23.89
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Ana	218.245.000	Dokumen pelaksanaan ke	1	dokumen	1	dokumen	74.679.000	34.22	34.22	1	dokumen	114.920.300	52.66	52.66	1	dokumen	52.136.000	23.89	23.89
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	67.320.000	Dokumen laporan hasil	2	laporan	2	laporan	18.536.000	27.53	27.53	2	laporan	18.536.000	27.53	27.53	2	laporan	9.836.000	14.61	14.61
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelen	150.925.000	Dokumen profil data te	1	dokumen	1	dokumen	56.143.000	37.20	37.20	1	dokumen	96.384.300	63.86	63.86	1	dokumen	42.300.000	28.03	28.03
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	360.341.370	Peningkatan Jumlah Kabu	4	kab/kota	4	kab/kota	180.393.000	50.06	50.06	4	kab/kota	198.593.600	55.11	55.11	4	kab/kota	217.882.200	60.47	60.47
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Du	189.686.650	Persentase Jumlah Kab	28.57	%	0	%	179.044.000	94.39	94.39	1.00	%	179.044.000	94.39	94.39	1	%	179.044.000	94.39	94.39
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pa	117.078.650	Dokumen hasil pelaksa	1	dokumen	1	dokumen	112.345.000	95.96	95.96	1	dokumen	112.345.000	95.96	95.96	1	dokumen	112.345.000	95.96	95.96
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	72.608.000	Dokumen hasil Monito	1	dokumen	1	dokumen	66.699.000	91.86	91.86	1	dokumen	66.699.000	91.86	91.86	1	dokumen	66.699.000	91.86	91.86
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkata	170.654.720	Dokumen Pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	1.349.000	0.79	0.79	0	dokumen	19.549.600	11.46	11.46	0	dokumen	38.838.200	22.76	22.76
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Pening	105.593.000	Dokumen hasil Rakor	1	dokumen	0	dokumen	1.349.000	1.28	1.28	0	dokumen	19.549.600	18.51	18.51	0	dokumen	38.838.200	36.78	36.78
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkata	65.061.720	Dokumen hasil Rapat K	1	dokumen	0	dokumen	0	0.00	0.00	0	dokumen	0	0.00	0.00	0	dokumen	0	0.00	0.00

7	PROGRAM PERLINDUNGAN KRUSUS ANAK	402.702.000	Persentase Peningkatan P	50	%	16,67	%	64.336.700	15,98	15,98	33,33	%	129.428.700	32,14	32,14	25	%	164.401.200	40,82	40,82
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lin	75.450.000	Dokumen Pelaksanaan Ke	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	30.310.000	40,17	40,17
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap An	75.450.000	Dokumen hasil Koordin	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	30.310.000	40,17	40,17
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	275.946.000	Dokumen Pelaksanaan Ke	1	dokumen	0	dokumen	64.336.700	23,31	23,31	1	dokumen	129.428.700	46,90	46,90	1	dokumen	134.091.200	48,59	48,59
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100.902.000	Dokumen pelaksanaan	1	dokumen	1	dokumen	73.336.200	72,68	72,68	1	dokumen	83.673.700	82,93	82,93	1	dokumen	85.576.200	84,81	84,81
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak	175.044.000	Dokumen pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	45.755.000	26,14	26,14	0	dokumen	48.515.000	27,72	27,72
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	51.306.000	Dokumen Pelaksanaan Ke	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Day	51.306.000	Dokumen pelaksanaan	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	198.477.300	Angka kelahiran Total/tot	2,1	-	2,24	-	0	0,00	0,00	2,24	-	0	0,00	0,00	2,24	-	0	0,00	0,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Peme	198.477.300	Dokumen Pemaduan dan	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kepa	150.000.000	Dokumen hasil Penyus	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00
	Advokasi dan Sosialisasi GPK	48.477.300	Dokumen hasil Advoka	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KIB)	136.994.500	Persentase Kebutuhan ber	5,36	%	12,55	%	68.943.250	50,33	50,33	12,55	%	74.396.850	54,31	54,31	12,55	%	74.396.850	54,31	54,31
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advoka	52.024.500	Dokumen hasil pengemb	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	0	0,00	0,00
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Kon	52.024.500	Jumlah kegiatan KIB PP	2	kegiatan	0	kegiatan	0	0,00	0,00	0	kegiatan	0	0,00	0,00	0	kegiatan	0	0,00	0,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak	84.970.000	Dokumen Pemberdayaan	1	dokumen	1	dokumen	68.943.250	81,14	81,14	1	dokumen	74.396.850	87,56	87,56	1	dokumen	74.396.850	87,56	87,56
	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kem	84.970.000	Dokumen hasil Pengem	1	dokumen	1	dokumen	68.943.250	81,14	81,14	1	dokumen	74.396.850	87,56	87,56	1	dokumen	74.396.850	87,56	87,56
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTER	147.287.500	Indeks Pembangunan Keh	60,32	-	54,01	-	0	0,00	0,00	54,01	-	38.711.500	26,28	26,28	54,01	-	38.711.500	26,28	26,28
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Mel	147.287.500	Dokumen hasil pelaksa	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0,00	0	dokumen	38.711.500	26,28	26,28	0	dokumen	38.711.500	26,28	26,28
	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan Pen	147.287.500	Jumlah Kabupaten / Kot	3	bupaten/ke	0	bupaten/ke	0	0,00	0,00	0	bupaten/ke	38.711.500	26,28	26,28	0	bupaten/ke	38.711.500	26,28	26,28

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS P3A-PPKB

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006